

Wapres Ma'ruf Sebut Penyebaran Hoax Seperti Deret Ukur Logaritma

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengungkap hoax atau berita bohong menjadi tantangan terbesar yang dihadapi umat beragama. Dia mengibaratkan penyebaran hoax seperti deret ukur dalam logaritma.

"Berita bohong itu berkembang lebih cepat seperti deret ukur dibandingkan dengan berita yang bersifat konfirmatif (pelurusan berita) yang seperti deret hitung," kata Ma'ruf, Jumat (19/11).

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka Konferensi VI Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se-Indonesia Tahun 2021 di Sulawesi Utara hari ini. Dalam pemaparannya, Ma'ruf mulanya menyinggung soal masifnya penyebaran informasi di era digital saat ini.

"Saat ini kita memasuki era digital yang serbacanggih, yang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat. Di antara informasi itu, ada yang bersifat positif, tapi ada yang sifatnya negatif, termasuk isu-isu yang dapat menimbulkan konflik antarumat beragama antara lain melalui narasi konspiratif dan berita bohong (hoax)," ujarnya.

Menurut Ma'ruf, berita bohong dapat berkembang lebih cepat dibandingkan pelurusan berita. Bahkan, Ma'ruf menyebut pemberitaan negatif berpotensi menggiring opini kepada

masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya konflik antarumat beragama.

"Di samping itu, sisi negatif dari teknologi informasi berbasis digital ini memiliki kemampuan yang disebut dengan kurasi algoritma yang menggiring setiap orang atau kelompok orang meyakini hanya terhadap informasi yang dipasok dari kelompoknya sebagai kebenaran, sementara kelompok lain berpedoman pada kebenaran yang diyakini kelompoknya sendiri. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbelahan sosial dalam hal ini keterbelahan antarumat beragama," sebutnya.

Ma'ruf pun mengajak agar forum komunikasi umat beragama turut andil dalam menjaga kerukunan bangsa. Dia juga mewanti-wanti agar para tokoh dan pemuka agama tak terpancing dengan berita hoax.

"Ini adalah salah satu tantangan yang harus dijawab oleh FKUB agar kerukunan umat beragama tetap terjaga dan terpelihara. Saya mengharapkan forum ini juga membahas tantangan tersebut secara mendalam serta menyiapkan langkah antisipasinya. Saya berharap justru tokoh-tokoh agama jangan malah terprovokasi oleh isu-isu berkembang, berselweran melalui medsos tidak terkendali itu. Ini harapan saya," ujarnya. ● mar

FOTO: ANT



TARGET VAKSINASI COVID-19 DOSIS PERTAMA

Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 kepada santri di Pondok Pesantren Daarur Rasul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/11). Pemerintah terus memfokuskan upaya dalam mencapai target vaksinasi sebesar 70 persen dari populasi penduduk menerima vaksin dosis pertama, yang diharapkan tercapai pada akhir Desember 2021 mendatang.

Arteria Dahlan Minta Penegak Hukum Tak Kena OTT, KPK Tak Setuju

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, menilai aparat penegak hukum (APH) seperti polisi, hakim, dan jaksa, tidak layak dijerat dengan operasi tangkap tangan (OTT) karena merupakan simbol negara. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut tak ada batasan KPK dalam melakukan OTT.

"Faktanya KPK dalam pasal 11 dinyatakan bahwa wewenang KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan itu untuk APH dan penyelenggara negara. Jadi tidak ada batasan APH maupun penyelenggara negara tidak perlu ditindaklanjuti, tidak perlu di OTT," kata Ghufron kepada wartawan, Jumat (19/11).

Ghufron beranggapan pernyataan Arteria bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam KU-HAP yakni pada pasal 11 UU 30/2002 Juncto 19, tahun 2019. Ghufron menegaskan KPK didirikan untuk menegakkan tindak pidana korupsi untuk seluruh penyelenggara negara termasuk aparat.

"Jikalau Mas Arteria beranggapan jangan di OTT, karena OTT bagian dari upaya paksa yang diberikan wewenang oleh KU-HAP tangkap tangan itu. Dan KPK didirikan salah satunya untuk menegakkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh APH dan penyelenggara negara. Sehingga pernyataan yang bersangkutan tentu bertentangan dengan Pasal 11 UU 30/2002 Juncto 19/2019," kata Ghufron.

Ghufron juga menyebut kalau pernyataan itu ber-

tentangan dengan semangat KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. "Berarti kan bertentangan dengan semangat KPK di hadapan untuk menangani penyelidik dan penuntutan terhadap APH dan penyelenggara negara. Itu subjek yang menjadi sasaran KPK adalah untuk itu," katanya.

Sebelumnya, pernyataan soal penegak hukum jangan di-OTT itu disampaikan Arteria saat menjawab pertanyaan dalam diskusi bertajuk 'Hukuman Mati bagi Koruptor Terimplementasikah?' yang digelar secara virtual oleh Unsoed.

Awalnya Arteria merespons pertanyaan salah satu peserta webinar itu terkait pendapatnya soal pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein, yang meminta KPK memanggil kepala daerah lebih dulu sebelum melakukan OTT.

Merespons pernyataan itu, Arteria mengungkap saat dia masih menjabat di Komisi II DPR, dia meminta agar penerapan OTT bagi kepala daerah, polisi, hakim, dan jaksa dicermati. Ia menegaskan, bukannya tidak boleh OTT, melainkan menurutnya penegakan hukum agar tidak gaduh dan mengganggu pembangunan.

"Dulu kami di Komisi II meminta betul bahwa upaya penegakan hukum, khususnya melalui instrumen OTT, kepada para kepala daerah, tidak hanya kepala-kepala daerah, terhadap polisi, hakim, dan jaksa, itu harus betul-betul dicermati. Bukannya kita tidak boleh apa mempersalahkan, meminta pertanggungjawaban mereka, tidak," kata Arteria, Kamis (18/11). ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



DISKUSI MEDIA

DENGAN PIMPINAN KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri (tengah) didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata (kiri) dan Nurul Ghufron (kanan) menghadiri diskusi media di gedung Juang KPK, Jakarta, Jumat (19/11). Dalam kegiatan tersebut pimpinan KPK berdiskusi dengan awak media yang bertugas di KPK dan memaparkan program jelang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 bertepatan "Satu Padu Membangun Budaya Antikorupsi".

Stafsus Presiden Sebut MUI Masih Dibutuhkan Umat Islam dan Pemerintah

"Keberadaan MUI saat ini dan masa akan datang sangat dibutuhkan umat Islam dan pemerintah. MUI tidak hanya menjadi benteng keberagamaan, tapi juga benteng dalam menjaga NKRI," kata Aminuddin Maruf.

JAKARTA (IM) - Staf Khusus Presiden, Aminuddin Maruf menilai, keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih dibutuhkan umat Islam dan pemerintah. Hal itu disampaikan Aminuddin merespons tuntutan sekelompok orang yang ingin MUI dibubarkan menyusul penangkapan pengurus Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain an-Najah oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

"Keberadaan MUI saat ini dan masa akan datang sangat dibutuhkan umat Islam dan pemerintah. MUI tidak hanya menjadi benteng keberagamaan, tapi juga benteng dalam menjaga NKRI," kata Aminuddin melalui keterangan tertulis, Jumat (19/11).

Aminuddin mengatakan, MUI merupakan lembaga yang sangat penting dalam menjaga akidah, moral, dan akhlak umat. Pemerintah pun

yakin dan percaya pada komitmen MUI terhadap NKRI dan pemberantasan terorisme. Komitmen itu salah satunya ditunjukkan dengan pembentukan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) oleh MUI.

Aminuddin menilai, penangkapan anggota MUI oleh Densus 88 Antiteror Polri bukan bagian dari aktivitas organisasi, tetapi aktivitas personal. Oleh karena itu, hal itu menjadi tanggung jawab pribadi. "Jangan kesalahan personal dibebankan kepada organisasi yang di dalamnya terdapat ribuan ulama moderat dari pusat hingga kabupaten/kota," ujarnya.

Meski begitu, Aminuddin percaya peristiwa ini akan menjadi momentum MUI

untuk melakukan konsolidasi internal agar peristiwa serupa tak terjadi. "Karena MUI adalah pegangan umat dalam menghadapi berbagai masalah yang semakin kompleks. Kita masih sangat membutuhkan MUI," kata dia.

Sebagaimana diketahui Densus 88 menangkap ter-

sangka teroris Zain An-Najah di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/11). Polisi mengungkapkannya, Zain An-Najah merupakan anggota anggota Dewan Syura Jamaah Islamiyah (JI) dan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (BM ABA). ● osm

Pengacara Minta Dekan Unri Tersangka Pencabulan Segera Disidangkan

PEKANBARU (IM) - Pengacara Dekan FISIP Universitas Riau (Unri) Syafril Harto, Dody Fernando, mendesak agar kasus dugaan pencabulan terhadap mahasiswa yang menjerat kliennya segera disidangkan. Dia berharap berkas perkara kliennya segera dilimpahkan ke kejaksaan.

"Kami berharap dalam bulan ini berkas sudah P21 ke Kejaksaan. Supaya kami bisa melihat apa yang terjadi di kasus ini. Kami harap ini disidangkan dalam pokok perkara biar terang semua," kata Dody, Jumat (19/11).

Dody mengaku telah mengetahui kabar penetapan tersangka kliennya. Dia pun menyampaikan akan mengikuti proses hukum ini. "Kami selaku penasihat hukum sudah mengetahui penetapan tersangka sejak Rabu (17/11) sore. Terkait penetapan tersangka kita menaati proses hukum ini," ujarnya.

Terkait apakah bakal mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka, Dody masih belum bisa memutuskan. Sebab, dia dan pihak keluarga masih harus musyawarah pasca-penetapan tersangka.

Menurut Dody, dipercepatnya proses siding untuk mempercepat pembuktian kliennya bersalah atau tidak. Jika tidak, dia mengancam akan melakukan upaya hukum kepada pihak pelapor dan

pihak yang membuat kliennya berstatus tersangka.

"Kalau melakukan ya jelas, kalau tidak juga bersih, clear nama Pak Syafril Harto. Kalau tidak terbukti, siap-siap kita akan lakukan upaya hukum perdata atau pidana ke para pihak itu nanti," katanya.

Alumni Fakultas Hukum Unri itu optimistis Syafril Harto tidak bersalah. Dia juga menuturkan hingga kini tidak tahu bukti-bukti apa saja yang mendasari penetapan tersangka kliennya.

"Kami berkeyakinan Pak Syafril Harto tidak melakukan. Kami akan mengumpulkan saksi-saksi untuk pembelaan pak Syafril Harto, sampai saat ini kami tidak tahu apa alat bukti yang jadi landasan," tutur dia.

"Bahkan kami melihat itu bukan peristiwa pidana nanti. Kalau landasan Permen Dikti ya itu Internal, itu pelanggaran etik dan sebagainya. Kalau gawean polisi ya pasal-pasal di KUHP. Permen Dikti tidak ada kewenangan kepolisian, ada satgas yang dibentuk," imbuhnya.

Kasus ini mencuat setelah video pengakuan seorang mahasiswa soal pelecehan seksual di kampus Unri viral. Mahasiswa itu mengaku menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan Dekan FISIP Unri Syafril Harto. ● osm

Prabowo Bertemu Megawati, Gerindra: Bentuk Silaturahmi yang Baik

JAKARTA (IM) - Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto berjumpa dengan Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Partai Gerindra menikmati kebersamaan koalisi se usai perjumpaan Prabowo dan Megawati.

"Saya belum sempat bertemu Pak Prabowo setelah pertemuan tersebut, sehingga tidak tahu persis detail isi pembicaraan beliau-beliau. Pertemuan tersebut adalah bentuk silaturahmi yang amat baik seperti yang selama ini selalu terjadi," kata Waketum Partai Gerindra Habiburrokhman kepada wartawan, Jumat (19/11).

Pertemuan di sela-sela pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu berlangsung di Istana Kepresidenan. Turut Hadir Ketua DPP Puan Maharani dalam pertemuan itu. Prabowo dengan Megawati memang diakui cukup dekat. Jika diingat kembali, Pilpres 2009 Megawati dan Prabowo merupakan capres dengan akronim Mega-Pro.

"Pak Prabowo sejak da-

hulu memang dekat dan akrab dengan Bu Mega dan Mbak Puan. Kalau bertemu pasti seru dan diwarnai tawa dan canda," ujar Habiburrokhman.

Partai Gerindra, kata Habiburrokhman, sangat terbuka berkoalisi dengan PDIP. Meski sempat berbeda 'jalan' di dua pilpres, Gerindra tak bertentangan dengan PDIP soal ideologi.

"Soal kemungkinan koalisi di 2024 sangat terbuka sekali, PDIP dan Gerindra punya sejarah pertemanan yang panjang. Kami pernah kerja sama di 2009 dan pernah berbeda pilihan di 2014 dan 2019, tetapi kami tidak pernah bermusuhan secara ideologi dengan mereka," kata Habiburrokhman.

Saat ini Gerindra menikmati berada di koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sisa waktu dua tahun jelang 2024 terbilang lama bagi Gerindra.

"Namun Pemilu 2024 masih cukup lama. Baiknya kita nikmati saja kebersamaan koalisi yang ada saat ini dengan semaksimal mungkin bekerja melayani rakyat," imbuhnya. ● osm



AKSI TUNTUTAN UPAH BURUH

Sejumlah baryuan dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (19/11). Mereka menuntut kepada Pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebesar 10 persen pada tahun 2022 dan segera mencabut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2022.